

IMPLEMENTASI PROGRAM BLT PADA MASYARAKAT TERDAMPAK COVID-19 DI KELURAHAN PASANGGRAHAN BARU KECAMATAN SUMEDANG SELATAN KABUPATEN SUMEDANG

Shofwan Hendryawan*, Anisa Nur'aini, Dian Nursari, Irma Yulianti, Neng Novitri
S.K, Sri Nurhayani, Andrie Wildan Y.

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sebelas April

E-mail: shendryawan1980sh@gmail.com

ABSTRACT

The application of public policy as an activity in the public policy process is often contrary to what is expected, and even makes policy products a stumbling block for policy makers themselves. That is the implementation of public policy. This requires a deep understanding of public policy studies. The research objective that the researchers conducted was to analyze and analyze the implementation of the Direct Cash Assistance Program (BLT) in Pasanggrahan Baru Village, Sumedang Selatan District, Sumedang Regency. See and analyze the constraints in the Implementation of Direct Cash Assistance Program (BLT) Policy in Pasanggrahan Baru Village, Sumedang Selatan District, Sumedang Regency. As well as to find out and analyze what preventive measures were taken to overcome obstacles in the implementation of the Direct Cash Assistance Program (BLT) Policy in Pasanggrahan Baru Village, Sumedang Selatan District, Sumedang Regency. The research method used in research using qualitative methods. Qualitative research to understand social phenomena from the perspective of participants. From this study found obstacles related to the Implementation of the Direct Cash Assistance Program (BLT) Policy in Communities Affected by Covid-19 in Pasanggrahan Baru District, South Sumedang Regency, Sumedang Regency, both related to communication, resources, disposition and bureaucratic structures. Enduring the obstacles that have been done is also an effort to overcome the obstacles that have occurred. So that the purpose of implementing the Direct Cash Assistance Program (BLT) Policy for Communities Affected by Covid-19 in Baru Pasanggrahan Village, Sumedang Selatan District, Sumedang Regency can be carried out as expected.

KeyWord: Public Policy, Implementation of Public Policy, Direct Cash Assistance Program.

PENDAHULUAN

Implementasi kebijakan publik sebagai salah satu aktivitas dalam proses kebijakan publik, sering bertentangan dengan yang diharapkan, bahkan menjadikan produk kebijakan itu sebagai menjadi batu sandungan bagi pembuat kebijakan itu sendiri. Itulah sebabnya implementasi kebijakan publik, diperlukan pemahaman yang mendalam tentang studi kebijakan publik yang menurut Djadja Saefullah dalam Tachjan (2006) bahwa studi kebijakan publik tersebut dapat dipahami dari dua perspektif yakni : Pertama, perspektif politik, bahwa kebijakan publik di dalamnya perumusan, implementasi,

maupun evaluasinya pada hakekatnya merupakan pertarungan berbagai kepentingan publik di dalam mengalokasikan dan mengelola sumber daya (*resources*) sesuai dengan visi, harapan dan prioritas yang ingin diwujudkan. Kedua, perspektif administratif, bahwa kebijakan publik merupakan ikhwal berkaitan dengan sistem, prosedur, dan mekanisme serta kemampuan para pejabat public (*official officers*) di dalam menterjemahkan dan menerapkan kebijakan publik, sehingga visi dan harapan yang diinginkan dicapai dapat diwujudkan di dalam realitas. Memahami kebijakan publik dari kedua

perspektif tersebut secara berimbang dan menyeluruh akan membantu kita lebih mengerti dan maklum mengapa suatu kebijakan publik tersebut meski telah dirumuskan dengan baik namun dalam implementasinya sulit terwujud.

Isitilah kebijakan (*policy*) seringkali penggunaannya dipertukarkan dengan istilah-istilah lain seperti tujuan (*goals*), program, keputusan, undang-undang ketentuan-ketentuan, usulan-usulan dan rancangan besar. Bagi para pembuat kebijakan (*policy makers*) istilah-istilah tersebut tidaklah akan menimbulkan masalah apapun karena mereka menggunakan referensi yang sama. Namun bagi orang-orang yang berada di luar struktur pengambilan kebijakan istilah-istilah tersebut mungkin akan membingungkan. Mustopadidjaja (1996) kebijakan publik akan terdiri dari 3 (tiga) tahap yaitu (1) tahap perumusan dan penetapan kebijakan (2) tahap pelaksanaan kebijakan serta (3) tahap penilaian hasil kebijakan.

Seorang pimpinan aparatur perlu mengenali dengan baik sistem implementasi kebijakan yang berlaku dalam penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan khususnya dalam bidang yang menjadi tugas dan tanggungjawab masing-masing ataupun yang kaitannya dengan itu. Bahkan umumnya ia memiliki kemampuan mengelola lingkungan SDM dan mengembangkan secara spesifik sistem implementasi kebijakan dalam wilayah tugasnya. Kepemimpinan memainkan peranan sentral dalam pemberian pelayanan unggul (Zeithami, 1990). Bahkan dari survey mereka telah membuktikan bagaimana komitmen manajemen yang kuat kepada kualitas pelayanan menggerakkan dan mendorong organisasi meningkatkan kinerja pelayanan. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan birokrat agar dapat memberikan pelayanan unggul. Pertama, para birokrat harus mengenal karakteristik pelayanan. Kedua, para

birokrat harus memahami dan melaksanakan asas-asas pelayanan. Ketiga, para birokrat harus memahami kualitas pelayanan yang dipersepsi oleh pelanggan (masyarakat).

Salah satu program yang diselenggarakan oleh pemerintah Indonesia sebagai penanggulangan kemiskinan yaitu seperti program bantuan kepada masyarakat miskin yang dikenal dengan program Bantuan Langsung Tunai (BLT). Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) adalah program pemerintah berjenis pemberian uang tunai yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat yang tergolong miskin. Ini merupakan suatu bentuk pemberdayaan di bidang ekonomi dalam upaya meningkatkan kesejahteraan hidup dan termasuklah disini Kabupaten Sumedang khususnya Kelurahan Pasanggrahan Baru yang mana diharapkan setiap Kelurahan memperoleh Program Bantuan Langsung Tunai (BLT).

Berdasarkan hasil dari observasi yang dilakukan di Kelurahan Pasanggrahan Baru Kecamatan Sumedang Selatan Kabupaten Sumedang terkait dengan Implementasi Kebijakan Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) Pada Masyarakat Terdampak Covid-19. Menemukan beberapa permasalahan sebagai berikut :

1. Kelurahan ini tidak punya dana yang memang harus langsung diberikan dari pihak kelurahan tapi kita hanya diberikan dari pihak Kabupaten, Provinsi, maupun dari Pihak Kementrian.
2. Tidak semua RW itu punya hp android jadi mereka mendata dulu ini yang tidak punya hp android dan hp kurang bagus. Masukan dari RT ke RW masukan ke Kelurahan, di Kelurahan kemudian uploading masukan ke aplikasi.
3. Pengajuan Pasanggrahan Baru mencapai 2000 lebih dan hanya mendapatkan pertama kali dana dari

pihak Provinsi hanya mendapat 1024 dan masyarakat berbondong-bondong ke Kelurahan menanyakan kenapa tidak dapat karena yang terdampak covid itu sendiri yang memang menjadi bukan kesalahan pihak Provinsi tapi kalau misalkan disebut untung-untungan karena datanya dimasukan semua ini belum tentu harus mendapatkan prioritas pandemi covid-19 dapat dan memang sebetulnya tidak perlu dapat ini yang menjadi permasalahan di masyarakat, dari pihak pemerintah dan kelurahan adamis atau persepsi masyarakat kepihak Kelurahan, RT maupun RW.

Fokus permasalahan pada penelitian ini sebagai berikut: 1)

TINJAUAN PUSTAKA

Implementasi Kebijakan Publik

Kaidah-kaidah atau syarat-syarat Implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh Mustopadidjaja (2002), yaitu sebagai berikut :

1. Kompetensi pimpinan Aparatur Palaksana Kebijakan

Seorang pimpinan aparatur perlu mengenali dengan baik sistem implementasi kebijakan yang berlaku dalam penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan, khususnya dalam bidang yang menjadi tugas dan tanggungjawab masing-masing ataupun yang kaitannya dengan itu. Bahkan umumnya ia memiliki kemampuan mengelola lingkungan SDM dan mengembangkan secara spesifik sistem implementasi kebijakan dalam wilayah tugasnya.

2. Struktur dan Dinamika Lingkungan Strategik

Lingkungan sekitar dapat berpengaruh terhadap pembuat kebijakan, setiap kebijakan yang diambil dalam sesuatu bidang kehidupan akan menimbulkan reaksi berantai dalam masyarakat, serta akan mempunyai pengaruh atau dampak tertentu terhadap perkembangan bidang

Bagaimana implementasi program BLT kepada masyarakat terdampak Covid-19 di Kelurahan Pasanggrahan Kecamatan Sumedang Selatan Kabupaten Sumedang?; 2) Apa saja faktor penghambat Implementasi program BLT kepada masyarakat terdampak Covid-19 di Kelurahan Pasanggrahan Kecamatan Sumedang Selatan Kabupaten Sumedang?; 3) Apa saja upaya untuk menanggapi faktor penghambat implementasi program BLT kepada masyarakat terdampak Covid-19 di Kelurahan Pasanggrahan Kecamatan Sumedang Selatan Kabupaten Sumedang?.

kehidupan sosial sesuai dengan substansi yang ditangani (sektoral, regional, institusional) dengan reaksi yang berkembang dalam masyarakat dan dengan jenis dan sifat kebijakan. Tak mungkin pimpinan aparatur dapat mengembang tugas melakukan pengelolaan pelaksanaan kebijakan publik secara baik dan efektif tanpa mengetahui desain kebijakan dan dinamika lingkungan strategik.

3. Sistem Pelaksanaan

Pelaksanaan kebijakan berlangsung melalui suatu sistem yang terdiri atas institusi-institusi publik maupun private dengan peran tertentu dalam pelaksanaan kebijakan, yang pada umumnya berkisar pada posisinya apakah sebagai perumus, pelaksana, dan pengawas institusi-institusi publik yang berperan dalam dalam pelaksanaan adalah parlemen, pejabat politik, birokrasi dan peradilan. Masing-masing mempunyai peran yang berbeda, yang intensitas keterlibatannya dipengaruhi oleh stratifikasi, jenis dan sifat kebijakan yang dilaksanakan. Peran dan keterlibatan masing-masing dapat dituangkan dalam suatu sistem sistem

dan pelaksanaan, yang pada dasarnya memberikan acuan mengenai apa yang harus dilakukan atau tidak dilakukan, persyaratan dan tata cara pelaksanaan yang diikuti dan pinalti apabila tidak dipatuhi.

Faktor Penghambat Implementasi Kebijakan Publik menurut Edward III dalam Agustino (2016) :

1. Komunikasi

2. Sumber daya

3. Disposisi

4. Struktur birokrasi

Upaya mengatasi hambatan implementasi kebijakan program menurut Sunggono (1994) :

1. Isi kebijakan

2. Informasi

3. Dukungan

4. Pembagian potensi

METODE

Dalam metode ini, metode yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif atau sering disebut metode naturalistik, karena penilaiannya kondisi yang alamiah (*natural setting*) dan hasil dari penelitian kualitatif lebih menekankan pada makna daripada generalisasi.

Adapun sasaran penelitian terdiri dari pegawai Kelurahan Pasanggrahan Kecamatan Sumedang Selatan Kabupaten Sumedang. Sedangkan informan penelitian sebanyak 7 orang yang terdiri dari Lurahm Kasi

Ekonomi dan Pembangunan, Kasi Sosial, Staf Pelaksana, dan Warga.

Teknik pengumpulan data yang diperoleh dilakukan melalui: Studi kepustakaan dan Studi lapangan (observasi, wawancara, dan dokumentasi). Untuk mengelola data hasil wawancara dan observasi, peneliti melakukan pengolahan data yang ditempuh sebagai berikut : *Data reduction* (reduksi data), *Data display* (penyajian data), dan *Conclucion drawing verification* (pemeriksaan kesimpulan atau verifikasi).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Kebijakan Program Bantuan Langsung Tunai di Kelurahan Pasanggrahan Baru Kecamatan Sumedang Selatan :

1. Kompetensi pimpinan aparatur pelaksana kebijakan

Adanya kemampuan dan keterampilan untuk mengelola proses pelaksanaan kebijakan dapat disimpulkan bahwa program Bantuan Langsung Tunai dilaksanakan oleh para pegawai atau staff dengan kemampuan dan keterampilan yang sesuai dengan tupoksi yang sudah ditetapkan yang tercantum dalam peraturan bupati sumedang nomor 29 tahun 2016. Setiap staff atau pegawai di kelurahan Pasanggrahan Baru memiliki pemahaman mengenai desain kebijakan secara utuh sehingga pelaksanaan

program BLT bisa dilaksanakan dengan baik.

2. Struktur dan dinamika lingkungan strategis

Adanya latar belakang kebijakan bahwa dalam pelaksanaan implementasi kebijakan program BLT di kelurahan pasanggrahan baru dilakukan sesuai dengan konsep kebijakan, dalam implementasi kebijakan program BLT di kelurahan Pasanggrahan Baru memiliki tujuan untuk meringankan beban kebutuhan hidup masyarakat yang terkena dampak covid-19, adanya ada sasaran kebijakan dapat disimpulkan bahwa yang menjadi sasaran dari adanya adanya program BLT yaitu untuk membantu memenuhi kebutuhan masyarakat yang benar-benar terkena dampak covid-19, dan adanya kekuatan

hukum yang mendasari kebijakan berdasarkan Peraturan Pemerintah, Kemensos, PERDA, Ketentuan Pemerintah, Ketentuan pusat dan Gubernur Bupati. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa implementasi kebijakan program BLT sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

3. Sistem pelaksanaan

Persyaratan-persyaratan dari program kebijakan yaitu memiliki persyaratan sebagai berikut: (a) Warga Kelurahan Pasanggrahan Baru (b) Memiliki KTP dan KK (c) Warga yang terkena PHK (d) Warga yang kurang mampu (e) Warga yang benar-benar terdampak covid-19 sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa program BLT yang dilaksanakan di Kelurahan Pasanggrahan Baru sudah memenuhi kriteria yang sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan, tata cara pelaksanaan program kebijakan yang terperinci dari mulai pendataan calon penerima bantuan program BLT sampai dengan proses pembagian dana bantuan BLT, adanya dukungan masyarakat bahwa implementasi kebijakan program BLT di Kelurahan Pasanggrahan Baru mendapatkan dukungan penuh dari masyarakat dalam pelaksanaan program BLT salah satunya dengan masyarakat datang dengan memenuhi protokol kesehatan serta menaati aturan yang di berlakukan Kelurahan Pasanggrahan Baru sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa pelaksanaan program BLT mendapatkan dukungan penuh dari masyarakat Kelurahan Pasanggrahan Baru, dan dalam implementasi program BLT di Kelurahan Pasanggrahan Baru berdasarkan indikator adanya sumber dana yang memadai. Bahwa dapat ditarik kesimpulan dana yang diberikan kurang mencukupi sehingga penerima bantuan BLT tidak merata.

Faktor yang mempengaruhi tingkat keberhasilan Implementasi Kebijakan menurut Edward III dalam Agustino (2016:136-141) :

1. Komunikasi

Penyaluran komunikasi kelurahan pasanggrahan baru mampu bekerjasama dan berkoordinasi dengan pihak kecamatan, babinsa, serta pihak kabupaten sehingga dalam penyaluran komunikasi tidak terdapat adanya perbedaan persepsi. Jadi dapat ditarik kesimpulan bahwa di Kelurahan Pasanggrahan Baru tidak terdapat perbedaan persepsi dari segi penyaluran komunikasi, Kelurahan Pasanggrahan Baru memiliki kejelasan informasi sehingga dapat melakukan komunikasi dengan pihak yang lain dalam menjalankan program BLT, implementasi kebijakan program BLT yang diselenggarakan di Kelurahan Pasanggrahan Baru dilaksanakan secara konsisten oleh para pelaksana kebijakan meskipun kekurangan-kekurangan tersebut sering terjadi dimana para pelaksana dilapangan sering disalahkan oleh pihak lain terkait dengan pengajuan penerima program BLT karena tidak semua masyarakat menerima bantuan tersebut. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa pelaksanaan implementasi kebijakan program BLT di Kelurahan Pasanggrahan Baru masih kurang konsisten.

2. Sumber Daya

Staf di Kelurahan Pasanggrahan Baru memiliki kompetensi sesuai dengan bidangnya masing-masing dan setiap pelaksana patuh terhadap peraturan dan regulasi yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, segi informasi yang diterima terdapat kejelasan sehingga mampu menjalin komunikasi dan berkoordinasi dengan pihak lain yang terkait dengan pelaksana kebijakan program BLT. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa informasi yang ada di Kelurahan Pasanggrahan Baru sesuai dengan perintah, regulasi dan peraturan pemerintah. Kewenangan yang ada seperti memberikan sosialisasi terkait pemahaman mengenai bahaya covid-19. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa

kewenangan yang ada di kelurahan pasanggrahan baru bersifat formal dan sesuai dengan aturan atau kebijakan pemerintah pusat. Selanjutnya, fasilitas yang ada di Kelurahan Pasanggrahan Baru tidak mencukupi karena kekurangan alat-alat yang digunakan oleh staf dalam melaksanakan kegiatan. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa fasilitas yang terdapat di Kelurahan Pasanggrahan Baru tidak mencukupi.

3. Disposisi

Pelaksanaan kegiatan program BLT yang diselenggarakan di Kelurahan Pasanggrahan Baru lebih mengkhhususkan kepentingan warga atau masyarakatnya karena peran dari dari kelurahan itu sendiri. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa di Kelurahan Pasanggrahan Baru dalam melaksanakan tugasnya lebih mengutamakan kepentingan warga. Dalam melakukan pengaturan birokrasi tidak bisa dilakukan sembarangan karena hal tersebut sudah tercantum dalam peraturan pemerintah serta sudah di SK-kan oleh Bupati sehingga di Kelurahan Pasanggrahan Baru terkait dengan pengaturan birokrasi semuanya sesuai dengan pemerintah pusat dan sudah di SK-kan. Kelurahan pasanggrahan baru tidak mendapatkan instentif apapun dari adanya program BLT. SOP yang diterapkan di Kelurahan Pasanggrahan Baru mengikuti anjuran dan menyesuaikan dengan aturan yang berlaku di pemerintah pusat. Pembagian kerja dan tanggung jawab sesuai dengan tupoksi.

Upaya-upaya Untuk Mengatasi Hambatan Implementasi Kebijakan Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Kelurahan Pasanggrahan Baru Kecamatan Sumedang Selatan Kabupaten Sumedang :

1. Isi Kebijakan

Pelaksanaan program BLT di Kelurahan pasanggrahan baru dilakukan

berdasarkan tujuan dan sasaran yang jelas yang sudah tercantum dalam musrenbang terkait pelaksanaan kebijakan. Dalam melaksanakan program BLT tidak ada ketetapan sendiri melainkan menjalankan ketetapan yang sudah ditetapkan pemerintah pusat. Pelaksanaan implementasi kebijakan BLT terkait dengan indikator kekurangan-kekurangan kebijakan yaitu masih banyak masyarakat yang belum menerima BLT serta kekurangan tenaga manusia.

2. Informasi

Implementasi kebijakan program BLT memiliki kejelasan informasi dan mampu berkoordinasi dengan pihak terkait pelaksana kebijakan program BLT dimasa pandemi covid-19. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam implementasi kebijakan program BLT tidak memiliki kekurangan intensitas informasi. Tidak terdapat hambatan dalam distribusi informasi sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa tidak terdapat hambatan distribusi informasi baik dari intern atau ekstern.

3. Dukungan

Implementasi kebijakan program BLT mendapatkan banyak dukungan dari berbagai pihak baik itu dari dinas/intansi/kantor terkait dan juga dari masyarakat di lingkungan Kelurahan Pasanggrahan.

4. Pembagian Potensi

Pembagian tugas yang ada di Kelurahan Pasanggrahan Baru telah sesuai dengan tupoksi yang telah ditetapkan sehingga dapat ditarik kesimpulan semua pembagian tugas yang ada di Kelurahan Pasanggrahan Baru sudah sesuai dengan tupoksi yang ada. Selain itu pembagian tanggung jawab sudah sesuai dengan tugas yang diberikan sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa pembagian tugas sesuai dengan pekerjaan dibidangnya masing-masing.

PENUTUP

Kesimpulan

Dalam pelaksanaan program BLT atau bantuan langsung tunai yang diselenggarakan di kelurahan pasanggrahan baru pelaksana atau aparatur di kelurahan memiliki kemampuan dan keterampilan yang baik serta memiliki pemahaman mengenai implementasi kebijakan program BLT , sehingga mampu berkoordinasi dengan pihak lain dalam pelaksanaan program bantuan langsung tunai atau BLT di Kelurahan Pasanggrahan Baru. Setiap aparatur dan Kelurahan Pasanggrahan Baru memperhatikan konsep dan aktualisasi terkait ketentuan pelaksanaan program BLT dengan memperhatikan hukum yang mendasari pelaksanaan program BLT berdasarkan Kemensos, Perda, ketentuan pemerintah, ketentuan pusat dan gubernur serta bupati kabupaten Sumedang. Sehingga program tersebut sesuai dengan sasaran dan tujuan yang sudah ditetapkan yaitu untuk membantu kebutuhan hidup sehari-hari masyarakat yang terkena dampak covid-19.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, Leo. 2016. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: CV. Alfabeta.
- Anggara, Sahya. 2014. *Kebijakan Publik*. Bandung : CV. Pustaka Setia.
- Bungin, Burhan. 2008. *Metode Penelitian Kualitatif*. Depok: Rajagrafindo.
- Dye, Thomas. 1991 . *Pengantar Kebijakan Publik*. Jakarta: Rajawali Press.
- Gie, The Liang. 2009. *Administrasi Perkantoran Modern*. Yogyakarta: Liberty

Pelaksanaan program BLT yang diselenggarakan di Kelurahan Pasanggrahan Baru memiliki dukungan dari masyarakat salah satunya datang ke Kelurahan dengan mematuhi protokol kesehatan, mematuhi aturan yang ada di Kelurahan,memberikan informasi mengenai permasalahan yang mereka alami terutama bagi masyarakat Kelurahan Pasanggrahan Baru. Akan tetapi dalam pelaksanaan program BLT di Kelurahan Pasanggrahan Baru dana yang diberikan untuk pelaksanaan program BLT tidak mencukupi karena masih banyak masyarakat yang belum menerima bantuan tersebut.

Saran

1. Untuk pelaksanaan kebijakan kedepan, diharapkan pelaksanaan implementasi kebijakan dapat lebih maksimal sehingga dimungkinkan dapat mencapai tujuan yang optimal.
2. Perencanaan yang kaitannya dengan waktu, sumber daya manusia dan sumber daya keuangan diwaktu yang akan datang harus lebih matang.
3. Masyarakat harus lebih responsif terhadap permasalahan yang ada salah satunya dimasa pandemi covid-19.

Iskandar, Jusman. 2016. *Teori Administrasi*. Bandung: Puspagada

Keban, Yeremias T. 2004. *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik, Teori dan Isu*. Yogyakarta: Gava Media

LAN RI. 2003. *Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia*. Jakarta: Gunung Agung.

Moleong, Lexy. J. 2014. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosda Karya.

- Mulyadi, Deddy. (2018). *Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik*. Bandung: CV. Alfabeta.
- Mustopadidjaja. 2002. *Manajemen Proses Kebijakan Publik*. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara
- Pasolong, 2017. *Teori Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta
- Siagian, Sondang P. 2007. *Studi Tentang Ilmu Administrasi*. Bandung: CV. Alfabeta.
- Silalahi, Ulbert. 2011. *Studi Tentang Ilmu Administrasi, konsep, teori dan dimensi*. Bandung: Sinarbaru Algesindo.
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung: CV. Alfabeta
- Syafi'i, Inu Kencana.(2006). *Ilmu administrasi Publik*, Jakarta: PT Asdi Mahasatya.
- Sunggono, 1994. *Hukum dan Kebijaksanaan Publik*. Jakarta: PT. Karya Unipress
- Syafiie, 2010. *Etika Pemerintahan (Edisi Revisi)*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.